

DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKOLAH MENENGAH NEGERI SE-PULAU LOMBOK

Humaidi

humaidi909@yahoo.com

Endar Pituringsih

M. Irwan

Program Pasca Sarjana Universitas Mataram

ABSTRACT

This study aims to test and to find empirical evidence about the effect of clarity goal budgeting, budgeting participation, reporting and accounting control system to the accountability performance of the public high schools throughout the Lombok Island. The method used is associative research. The total population are 262 public high schools. To determine the number of population samples used the formula Slovin with standard error of 10% in order to obtain a sample size of 72. Respondents were recruited in this study are development school teams and school stakeholders. The analytical tool used in the study were multiple linear regression, the unit of analysis in this study are state secondary school (junior high school, senior high school, and vocational school) throughout the Lombok Island. The results of this study showed that the goal clarity budgeting, budgeting participation, reporting and accounting control and simultaneous partial effect on performance accountability of state secondary schools throughout the Lombok Island. This study may provide information to stakeholders (government and public) to evaluate and to do the monitoring function process of accountability and transparency of state budgets secondary schools throughout the Lombok Island.

Key words: clarity goal budgeting, budgeting participation, reporting, accounting control system, performance accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menengah negeri se-Pulau Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Jumlah populasi 262 sekolah menengah negeri. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi digunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10% sehingga diperoleh sampel sebesar 72. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate simple randomsampling* dan *cluster sampling* dengan jumlah sampel 72 responden dari 72 sekolah menengah negeri. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah tim pengembang sekolah dan stakeholders. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda, unit analisis dalam penelitian ini adalah sekolah menengah (SMP, SMA, SMK) negeri se-Pulau Lombok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menengah negeri se-Pulau Lombok. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders (pemerintah dan masyarakat) untuk mengevaluasi dan melakukan fungsi monitoring terhadap proses pertanggungjawaban dan transparansi anggaran sekolah menengah negeri se-Pulau Lombok.

Kata kunci: kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, akuntabilitas kinerja

PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003 pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa sumber anggaran pendidikan berasal dari anggaran internal dan eksternal. Anggaran internal bersumber dari masyarakat dalam bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik yang diserahkan kepada sekolah, sedangkan anggaran eksternal bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pasal 49 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN. Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang tua murid. Kesemua anggaran tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

Besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat tersebut, menuntut sekolah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja. Sistem akuntansi digunakan sebagai alat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas (sistem dan mekanisme penganggaran) yang dilakukan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2015, terdapat temuan terkait dengan hasil pemeriksaan kinerja di bidang pendidikan. Salah satu temuan yang tercatat dalam LHP BPK tahun 2015 adalah permasalahan atas pengelolaan dana BOS dan pengelolaan BSM (Bantuan Siswa Miskin) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram. Permasalahan pengelolaan BSM terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Penyaluran dan penggunaan dana pendidikan belum sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu tepat dalam

jumlah, penggunaan, dan waktu. Akibatnya, tujuan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan belum tercapai (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester I, 2015: 56).

Hasil temuan BPK tersebut, tidak terlepas dari bagaimana bentuk akuntabilitas kinerja setiap sekolah. Apabila laporan pertanggungjawaban administrasi dari sekolah bagus maka administrasi di tingkat atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) juga bagus, karena sistem manajemen di tingkat atas lebih kepada hasil rekapitulasi laporan dari manajemen tingkat bawah yaitu sekolah.

Rendahnya akuntabilitas kinerja sekolah di atas tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kenis dalam Anjarwati (2012), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Selain itu, Perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dan sebaliknya, anggaran akan berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok. Proses penyusunan anggaran dapat memotivasi pimpinan untuk mengembangkan arah bagi organisasi, meramalkan kesulitan, mengembangkan kebijakan masa depan, karena anggaran mempunyai dampak fungsional dan disfungsi-onal terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Cara untuk mencegah terjadinya dampak disfungsi-onal anggaran, bawahan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran (Nurhalimah dan Abdullah 2013). Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Kusumaningrum (2010), Herawati (2011), Anjarwati (2012), dan Emilia *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi.

Namun hasil penelitian mereka masih terdapat perbedaan sehingga perlu dilakukan pengujian ulang atas variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh parsial dan simultan kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menengah Negeri, yang mana akuntabilitas kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah selaku pemegang amanah (*agen*) kepada masyarakat dan pemerintah selaku pemberi amanah (*principal*) sehingga mendukung teori keagenan (*agency theory*) dan teori sinyal (*signaling theory*). Selain itu, manfaat praktis dan kebijakan penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan anggaran sekolah yang akan dibuat, dengan memperhatikan kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah yang dikelola.

TINJAUAN TEORETIS

Munculnya masalah asimetri informasi antara pihak sekolah dengan *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat) sebagai akibat tingginya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan yang menuntut pihak sekolah untuk melakukan akuntabilitas kinerja, oleh karena permasalahan tersebut, yang menjadi grand teori pada penelitian ini adalah teori keagenan dan teori sinyal.

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai *prinsipal* (pemilik) yang

menunjuk orang lain sebagai *agen* (manajer) untuk melakukan jasa untuk kepentingan *prinsipal* termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan keputusan (Kassel, 2008). Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa hubungan keagenan dalam penelitian ini yaitu sekolah dengan *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat), dimana kepala sekolah sebagai *agen* sedangkan *stakeholders* adalah *principal*. Instansi sekolah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dengan sebaik-baiknya serta melakukan sistem pelaporan keuangan secara transparan. Spence dalam Moxham dan Boaden (2007) menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi relevan yang dimanfaatkan oleh pihak penerima. Sistem pelaporan keuangan sekolah yang baik akan memberikan sinyal kepada pemerintah dan masyarakat bahwa akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh sekolah sudah bejalan. Dengan demikian, maka masalah asimetri informasi antara pihak sekolah selaku *agent* dengan pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*) selaku *principal* dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Trisnawati dan Ahmad (2013) yang menyatakan bahwa teori *signaling* dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak *agen* dengan *principal*.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja sekolah sangat penting karena tingginya tuntutan *stakeholder* terhadap pertanggungjawaban kinerja sekolah. Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011), sedangkan Akuntabilitas kinerja sekolah adalah kemampuan

sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan (Fatah, 2004).

Penelitian empiris tentang kinerja telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Wijaya dan Akbar (2013), Badruzman dan Chairunnisa (2012), Curristine (2005), Jaros (2007), Zakaria *et al.* (2007), Gori dan Fissi (2014), Antipova dan Antipov (2014), Micheli dan Neely (2010), Ghobadian dan Ashworth (1994), Kassel (2008), Moxham dan Boaden (2007), Yuen dan Ng (2012), Dhermawan *et al.* (2014), Karmandita dan Subudi (2014), Safwan *et al.* (2014), Sanjaya dan Indrawati (2014), Sulistyaningsih (2009), Winanti (2011), sehingga memberi wawasan baru pada perkembangan kinerja pada sektor publik seperti Sekolah Menengah Negeri.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Proses penyusunan anggaran dapat memicu perilaku dari pelaksana anggaran untuk melakukan senjangan anggaran yang dikarenakan adanya sikap dan norma subjektif yang negatif yang dimiliki oleh pelaksana anggaran (Su dan Ni, 2013). Locke dalam Herawati (2011) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan, dimana dengan adanya sasaran yang jelas akan memudahkan dalam menyusun target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana target anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran (Anjarwati, 2012). Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Informasi yang jelas, tepat waktu, dan obyektif sangat diperlukan dalam proses penyusunan anggaran (Lavarda dan Almeida, 2013). Adanya informasi yang memadai akan memudahkan penyusunan anggaran untuk dapat menyusun anggaran dengan baik. Information Asymmetry me-

rupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakpastian informasi karena di dalam organisasi ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak (Busuioc dan Birau, 2011).

Partisipasi Anggaran

Partisipasi dalam proses penganggaran dilakukan untuk mentransfer informasi yang dimiliki bawahan kepada atasan (Shields dan Young, 1993). Menurut Milani (1975), partisipasi anggaran adalah keterlibatan dan pengaruh bawahan dalam proses pembuatan keputusan anggaran, dimana aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan sehingga lebih dimungkinkan bagi bawahan dalam melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang dapat dicapai, sedangkan Anjarwati (2012) mendefinisikan partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang pada periode tertentu. Menurut Aprilia dan Hidayani (2012), Partisipasi yang tinggi dalam proses penganggaran diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berpartisipasi dan memberikan saran pada persiapan anggaran sehingga anggaran yang akan dibuat lebih efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia selama ini telah diterapkan, namun hasil dari penerapan tersebut belum terealisasi secara optimal sesuai yang diharapkan. Ini tercermin dari pencapaian kinerja pegawai yang masih rendah dalam mengembang amanah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Amri *et al.* (2009) menyatakan menilai pemerintahan tercermin dari pencapaian kinerja. Kinerja pemerintahan yang baik dihasilkan dari aparaturnya yang bersih dan berwibawa sesuai hasil kerja yang dicapai.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggung-

jawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Anjarwati, 2012)

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi di sekolah sangat penting, terutama dalam pengelolaan inventaris aset sekolah. Pengendalian akuntansi menurut Herawati (2011), pengendalian akuntansi adalah perencanaan organisasi serta prosedur dan catatan terkait dengan pengamanan harta kekayaan organisasi dan reliabilitas laporan keuangan, sedangkan menurut Kusumaningrum (2010), pengendalian akuntansi (*Accounting Controls*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.

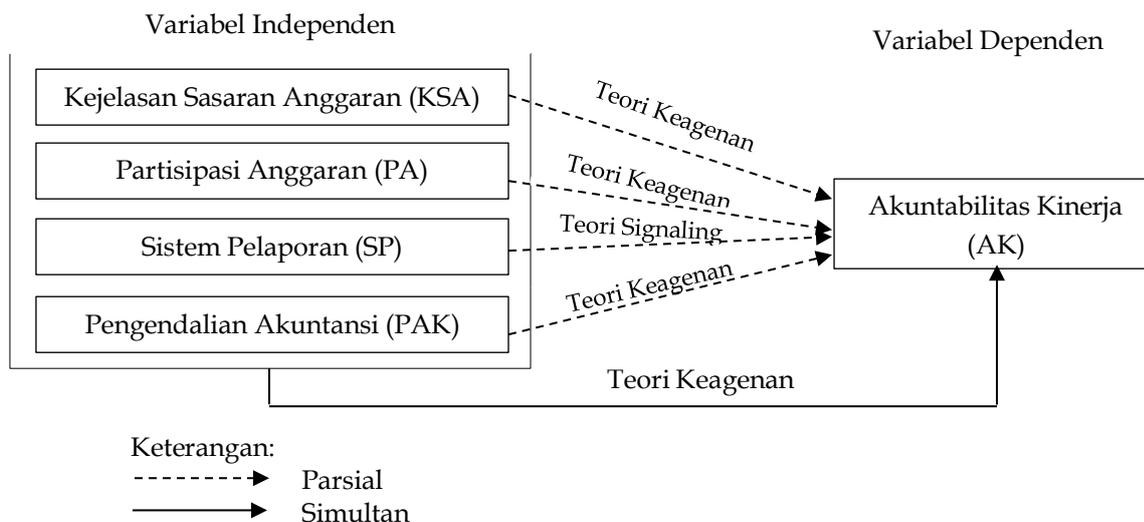
Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi cenderung untuk menciptakan senjangan anggaran (Yilmaz dan Ozer, 2011). Penggunaan system pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan ter-

tentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja (Nuraini dan Indudewi, 2012)

Rerangka Konseptual

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok secara parsial dan simultan. Tingginya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap sekolah menuntut pihak sekolah untuk melaksanakan akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja sekolah yang tinggi belum sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya temuan BPK terhadap akuntabilitas kinerja sekolah.

Disamping itu, fenomena beberapa Sekolah Menengah Negeri di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur yang tidak lengkap dalam melakukan pertanggung jawaban keuangan seperti tidak membuat RAPBS, tidak melibatkan komite sekolah dalam menyusun RKAS dan tidak membuat daftar pembelian barang inventaris sekolah. Berikut ini digambarkan rerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual Penelitian

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan konflik antara agen dengan principal. Rendahnya akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Negeri sebagai akibat adanya asimetri informasi antara sekolah selaku agen dengan pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*) selaku principal. Anggaran sekolah yang tidak jelas, rendahnya partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kurangnya pengendalian akuntansi di sekolah merupakan pemicu rendahnya akuntabilitas kinerja sekolah.

Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Trisnawati dan Ahmad (2013) yang menyatakan bahwa teori *signaling* dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dengan *principal*. Teori *signaling* menjelaskan bahwa sekolah sebagai pihak yang diberi amanat oleh pemerintah dan masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik. Sistem pelaporan keuangan yang baik, dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal yang baik kepada pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah

Locke dalam Herawati (2011) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan dan kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik jika dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas, spesifik, rinci, terukur, dan dapat dicapai.

Teori keagenan menyatakan bahwa antara agen (kepala sekolah) sering terjadi ketidak seimbangan informasi dengan pihak *principal* (*stakeholders*) yang diakibatkan karena suatu kepentingan pada masing-masing. Hal tersebut biasanya dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi ketidak seimbangan dalam memperoleh informasi

antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi (*user*). Adanya sasaran yang jelas akan memudahkan penyusunan target-target anggaran dan mempermudah kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas sekolah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah. Anggaran harus bisa menjadi tolok ukur pencapaian akuntabilitas kinerja yang diharapkan sehingga perencanaan anggaran bisa menggambarkan sasaran anggaran secara jelas.

Penelitian Anjarwati (2012), membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti semakin jelas sasaran anggaran sekolah maka akuntabilitas kinerja sekolah semakin bagus. Berbeda dengan hasil penelitian Herawati (2011) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sekolah sebagai berikut:

H_1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah

Penyusunan anggaran dimaksudkan bukan hanya untuk menyajikan informasi mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya-biaya dan pendapatan sebagai pusat akuntabilitas dalam suatu organisasi, tetapi juga merupakan suatu alat pengendalian, komunikasi dan evaluasi kinerja. Kassel (2008) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan dan pengaruh bawahan dalam proses pembuatan keputusan anggaran, dimana aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan sehingga lebih memungkinkan bagi bawahan dalam

melakukan negosiasi dengan atas mengenai target anggaran yang dapat dicapai.

Pimpinan tingkat bawah dalam hal ini bagian kurikulum, kesiswaan, sarana-prasarana, kehumasan dan komite sekolah seringkali memiliki informasi yang lebih baik mengenai anggaran sekolah yang di perlukan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas sekolah dari pada kepala sekolah, oleh karena itu, asimetri informasi rentan terjadi dalam hal ini. Teori keagenan membantu mengatasi asimetri informasi dengan cara pimpinan tingkat bawah akan berusaha memberikan informasi tersebut ke dalam usulan anggaran yang menjamin bahwa pimpinan memperoleh sumber-sumber yang mencukupi dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Partisipasi penyusunan anggaran memungkinkan para pelaksana anggaran lebih memahami berbagai masalah yang timbul saat pelaksanaan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu unsur yang menekankan pada proses kerjasama dari berbagai pihak, baik bawahan maupun pimpinan level atas. Anggaran yang disusun tidak hanya ditentukan oleh atasan saja, tetapi juga melibatkan bawahan, karena pimpinan level bawah merupakan bagian dari organisasi yang memiliki hak suara untuk memilih tindakan secara benar dalam proses manajemen. Penelitian Nurhalimah dan Abdullah (2013) dan Emilia *et al.* (2013) yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut berarti semakin aktif keterlibatan para pengguna anggaran dalam penyusunan anggaran maka akuntabilitas kinerja semakin tinggi. Sebaliknya Sumarno (2005) menemukan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan negatif yang signifikan antara kinerja manajerial dengan partisipasi anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sekolah sebagai berikut:

H₂ : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban kepala sekolah (pimpinan instansi sekolah) kepada *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan akuntabilitas kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Teori *signaling* menjelaskan bahwa sekolah sebagai pihak yang diberi amanat oleh pemerintah dan masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik. Tujuannya adalah agar pemerintah dan masyarakat dapat terus mendukung kinerja sekolah saat ini, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. Sistem pelaporan keuangan yang baik, dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal yang baik kepada pemerintah dan masyarakat.

Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Herawati (2011) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu hipotesis pengaruh antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja sekolah sebagai berikut:

H₃ : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah

Pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Teori keagenan dapat meminimalisir asimetri informasi di dalam internal pengelolaan keuangan sekolah. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para kepala sekolah dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam penelitian Kusumaningrum (2010) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi maka akuntabilitas kinerja semakin bagus. Sebaliknya Penelitian Herawati (2011) dan Anjarwati (2012) menemukan bahwa pengendalian akuntansi juga tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis pengaruh antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sekolah sebagai berikut:

H₄ : Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah

Menciptakan akuntabilitas yang tinggi tentunya sekolah harus memiliki sasaran anggaran yang jelas. Untuk mencapai anggaran yang jelas tentunya instansi sekolah harus melibatkan *stakeholders* dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Teori keagenan memberikan berbagai gambaran tentang bagaimana agen dengan principal menjalin

hubungan yang harmonis, supaya anggaran yang disusun bersama menjadi lebih baik dan akurat tentunya harus didukung dengan pengendalian akuntansi yang bagus.

Penelitian Anjarwati (2012) tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menghasilkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sekolah sebagai berikut:

H₅ : Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok selama 43 hari mulai dari tanggal 5 September 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016. Sumber data penelitian yaitu data primer. Teknik pengambilan data dengan penyebaran kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah salah satu tim pengembang sekolah yang terdiri dari Kepala Tata Usaha, Bendahara sekolah, Wakil-wakil Kepala Sekolah, Ketua Komite, Bendahara Komite, dan lain-lain yang terkait dengan tim pengembang Sekolah Menengah Negeri pada jenjang SMP, SMA dan SMK yang ada dilingkup dinas pendidikan pemuda dan olahraga di Pulau Lombok yang berjumlah 262. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi ter-

tentu yang dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Dari jumlah populasi 262 yang diambil sebagai sampel adalah 72 orang responden. Cara pengambilan sampel dengan teknik *Probability Sampling* yang menggunakan *Proportionate Simple Random Sampling* dan *Cluster Sampling*.

Definisi Operasional Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah gambaran tentang luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Oleh sebab itu kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran.

Kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Emilia *et al.* (2013) sebagai berikut: (1) tujuan, (2) kinerja, (3) sasaran, (4) jangka waktu, (5) sasaran prioritas, (6) tingkat kesulitan dan (7) koordinasi. Pengukuran variabel berwujud skala likert mengenai fakta atau kenyataan sesuai dengan pengalaman seseorang dilapangan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memiliki pilihan skor 5, 4, 3, 2, dan 1 berdasarkan pilihan jawaban yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Jenis instrument (kuisisioner) yang digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran diadopsi dari penelitian Emilia *et al.* (2013) dengan penyesuaian. Kuisisioner penelitian ini masih peneliti sesuaikan dengan instansi tempat lokasi penelitian.

Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih yang akan membawa pengaruh pada masa yang akan datang bagi para pembuat keputusan. Partisipasi kepala sekolah dalam proses penganggaran mengarah pada seberapa besar kepala sekolah

melibatkan bawahan dan *stakeholders* dalam penyusunan anggaran sekolah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran.

Variabel partisipasi anggaran diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Nurhalimah dan Abdullah (2013), sebagai berikut: (1) kontribusi dalam penyusunan anggaran, (2) keterlibatan dalam penyusunan atau pernyataan anggaran, (3) alasan melakukan revisi anggaran, (4) usulan kepada atasan, (5) pengaruh dalam penyelesaian akhir, dan (6) frekuensi penyampaian pendapatan.

Pengukuran variabel berwujud skala likert mengenai fakta atau kenyataan sesuai dengan pengalaman seseorang di lapangan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memiliki pilihan skor 5, 4, 3, 2, dan 1 berdasarkan pilihan jawaban yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Instrumen (kuisisioner) untuk mengukur partisipasi penyusunan anggaran yang digunakan untuk mengukur partisipasi penyusunan anggaran diadopsi dari penelitian Nurhalimah dan Abdullah (2013) dengan penyesuaian.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan pada penelitian ini adalah bentuk mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh sekolah, baik pelaporan yang berkaitan dengan anggaran sekolah maupun kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh sekolah. Sistem pelaporan diukur menggunakan 3 indikator penting yang diadopsi dari Anthony dalam penelitian Herawati (2011) yaitu: Penyebab terjadinya penyimpangan, Tindakan yang diambil dan Lamanya waktu koreksi. Skala pengukuran adalah bernilai satu sampai lima. Skor terendah adalah nilai satu yang menunjukkan kinerja yang rendah dan skor tertinggi menunjukkan kinerja yang tinggi.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi pada penelitian ini adalah perencanaan sekolah serta prosedur dan catatan terkait dengan pe-

ngamanan harta kekayaan (inventaris) sekolah. Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan 4 pertanyaan yang digunakan dalam penelitian Herawati (2011). Indikator dalam variabel ini adalah pusat kegiatan, ruang lingkup, maksud, sifat struktur, sifat informasi, orang yang terlibat, sumber ilmu, dan lingkup waktu. Skala variabel diukur dengan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

Akuntabilitas kinerja sekolah

Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik (*stakeholders*) segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan. Pemegang amanah (*agent*) dalam hal ini kepala sekolah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yakni *stakeholders* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2002). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan lima indikator variabel, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Kelima indikator di atas dikembangkan menjadi 8 item pertanyaan yang dipakai untuk mengukur akuntabilitas kinerja sekolah. Skala pengukuran menggunakan skala likert dengan nilai 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor terendah adalah nilai satu yang menunjukkan kinerja yang rendah dan skor tertinggi menunjukkan kinerja yang tinggi.

Prosedur Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih

variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Sebelum dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan hetroskedasitisitas.

Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AK = a + b_1KSA + b_2PA + b_3SP + b_4PAK + e$$

Dimana:

AK	= Akuntabilitas Kinerja Sekolah
a	= Konstanta
b_i	= Koefisien regresi ($i=1,2,3,4$)
KSA	= Kejelasan sasaran anggaran
PA	= Partisipasi anggaran
SP	= Sistem pelaporan
PAK	= Pengendalian akuntansi
e	= Error

Pengujian Hipotesis

Uji Pengaruh Parsial Variabel Independen (Uji Statistik t)

Uji t ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (pengaruh) yang signifikan antara satu variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan versi variabel dependen dengan syarat variabel independen yang lain dianggap tetap (Ghozali, 2011: 98). Criteria keputusan uji t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dari hubungan diantara variabel-variabel tersebut yang terdapat pada output SPSS. Jika nilai probabilitas signifikansi t lebih kecil dari 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh parsial yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011).

Koefisien Determinasi

Perhitungan Koefisien determinasi (R^2) menggambarkan atau menunjukkan tingkat kemampuan model yang meliputi variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat kemampuan koefisien determinasi bernilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Perhitungan koefisien determinasi akan digunakan dan diuji dalam uji F (Ghozali, 2011).

Uji Pengaruh Simultan Variabel Independen (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011). Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila probabilitas signifikansi $>0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- (2) Apabila probabilitas signifikansi $<0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang disebar sebanyak 72 buah. Kuesioner yang kembali sebanyak 72 buah. Kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 72 buah.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan *software computer* melalui *Program Statistic Package for Social Science* (SPSS) 16.0. Berdasarkan hasil pengolahan data seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi di atas 0,30.

Uji Reliabilitas

Menguji kehandalan kuisisioner yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach*

Alpayang lazim digunakan dengan bantuan program komputer *Program Statistic Package for Social Science* (SPSS) 16.0. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini reliabel karena nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh pernyataan baik variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi), maupun variabel dependen (akuntabilitas kinerja) dinyatakan normal. Serta hasil uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut tabel 1. Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda pada Tabel 1, diketahui bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,484. Hal ini berarti 48,4% variasi naik turunnya akuntabilitas kinerja dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi), sedangkan sisanya 51,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

Dari tabel 1 hasil analisis data, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
 $AK = -5,470 + 0,281KSA + 0,446PA + 0,715SP + 0,575PAK + 2,948$

Uji Hipotesis

Uji simultan dengan uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut tabel 2.

Tabel 1
Regresi Linear Berganda (Hasil Uji t)

Variabel	Unstandardized coefficients		T	Sig.	Keterangan
	B	Standar Error			
(constant)	-5,470	4,993	-1,096	0,277	
Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)	0,281	0,094	3,000	0,004	Diterima
Partisipasi Anggaran (PA)	0,466	0,130	3,579	0,001	Diterima
Sistem Pelaporan (SP)	0,715	0,268	2,672	0,009	Diterima
Pengendalian Akuntansi (PAK)	0,575	0,160	3,591	0,001	Diterima
Adjusted R ² Square = 0,484					
Standar error of the estimate = 2,948					

Sumber: Data primer diolah (2016)

Tabel 2
Regresi Linear Berganda (Hasil Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	613.689	4	153.422	17.654	.000 ^a
	Residual	582.255	67	8.690		
	Total	1195.944	71			

a. Predictors: (Constant), PAK, PA, SP, KSA

b. Dependent Variable: AK

Sumber: Data primer diolah (2016)

Variabel-variabel tersebut dikatakan berpengaruh apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi di bawah 5 %. Berdasarkan hasil olah data, nilai $F_{hitung} = 17,654 > F_{tabel} = 2,50$ dan nilai signifikansi hitung = $0,000 < \text{nilai signifikansi tabel} = 0,05$, artinya secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa:

a. Tabel 1 di atas menunjukkan nilai t_{hitung} variabel kejelasan sasaran anggaran = $3,000 > t_{tabel} = 1,993$, dan nilai signifikansi = $0,004 < \text{signifikansi tabel} = 0,05$. Artinya, hipotesis 1 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

b. Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan nilai t_{hitung} variabel partisipasi anggaran = $3,579 < t_{tabel} = 1,993$, dan nilai signifikansi = $0,001 < \text{signifikansi tabel} = 0,05$. Artinya, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja manajerial diterima.

c. Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan nilai t_{hitung} variabel sistem pelaporan = $2,672 > t_{tabel} = 1,993$, dan nilai signifikansi = $0,009 < \text{signifikansi tabel} = 0,05$. Artinya, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

d. Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan nilai t_{hitung} variabel pengendalian akuntansi = 3,591 > t_{tabel} = 1,993, dan nilai signifikansi = 0,001 < signifikansi tabel = 0,05. Artinya, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial diterima.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa secara parsial variabel-variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi, masing-masing berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berikutnya, secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t_{hitung} = 3,000 > t_{tabel} = 1,993 dan nilai tingkat signifikansi t_{hitung} = 0,004 < 5%. Hal ini berarti hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

Berdasarkan penilaian responden, terlihat bahwa rata-rata skor jawaban responden untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sudah mencapai tingkat yang baik dengan skor rata-rata keseluruhan sebesar 4,16. Artinya, Rencana kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun sesuai dengan perencanaan program kegiatan di sekolah serta sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan anggaran sekolah. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa sekolah menengah negeri sudah sepenuhnya memiliki sasaran anggaran yang jelas.

Teori keagenan menyatakan bahwa antara agen (kepala sekolah) sering terjadi ketidak seimbangan informasi dengan pihak

principal (stakeholders) yang diakibatkan karena suatu kepentingan pada masing-masing. Adanya sasaran yang jelas akan memudahkan penyusunan target-target anggaran dan mempermudah kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas sekolah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah.

Indikator kinerja yang selama ini digunakan oleh sekolah dalam melakukan akuntabilitas kinerja keuangan sekolah berpedoman pada juklak-juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlaku. Juknis BOS mengatur segala bentuk transaksi penggunaan uang serta bentuk pelaporan yang harus dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, segala bentuk program/kegiatan sekolah beserta anggaran sekolah tersusun secara jelas dan spesifik sesuai mata anggaran dan sarannya.

Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Emilia *et al.* (2013), Anjarwati (2012), yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Herawati (2011) yang menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel partisipasi anggaran memiliki nilai t_{hitung} = 3,579 > t_{tabel} = 1,993 dan tingkat signifikansi t_{hitung} = 0,001 < 5%. Hal ini berarti hipotesis 2 yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Koefisien korelasi parsial sebesar 0,466

menunjukkan setiap peningkatan partisipasi bawahan (tim pengembang sekolah) dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Semakin aktif tim pengembang sekolah dalam penyusunan anggaran, semakin berkualitas anggaran yang akan ditetapkan. Penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi tim pengembang sekolah dimungkinkan menghasilkan suatu keputusan anggaran yang relevan dengan tujuan organisasi.

Tim pengembang sekolah dalam hal ini bagian kurikulum, kesiswaan, sarana-prasarana, kehumasan, kepala tata usaha dan komite sekolah seringkali memiliki informasi yang lebih baik mengenai anggaran sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas sekolah dari pada kepala sekolah. Oleh karena itu, asimetri informasi rentan terjadi dalam hal ini. Teori kegenan membantu mengatasi asimetri informasi dengan cara tim pengembang sekolah akan berusaha memberikan informasi ke dalam usulan anggaran yang menjamin bahwa pimpinan memperoleh sumber-sumber yang mencukupi dalam melaksanakan aktivitas sekolah.

Partisipasi anggaran memungkinkan para pelaksana anggaran lebih memahami berbagai masalah yang timbul saat pelaksanaan anggaran. Partisipasi anggaran merupakan salah satu unsur yang menekankan pada proses kerjasama dari berbagai pihak, baik bawahan maupun stakeholders. Anggaran yang disusun tidak hanya ditentukan oleh atasan saja, tetapi juga melibatkan bawahan, karena pimpinan level bawah merupakan bagian dari organisasi yang memiliki hak suara untuk memilih tindakan secara benar dalam proses manajemen.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori partisipasi penyusunan anggaran yang dikemukakan oleh Kassel (2008) yang menyatakan partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan dan pengaruh bawahan dalam proses pembuatan keputusan anggaran, dimana aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan sehingga memungkinkan bagi

bawahan dalam melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang dapat dicapai. Agar anggaran tepat sasaran dan tujuan, anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan setiap bagian yang terkait didalamnya. Komunikasi dan koordinasi antara bawahan dan atasan, dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan untuk menimbulkan perilaku positif, yaitu perilaku pimpinan untuk sejalan dengan tujuan organisasi, serta mencegah timbulnya dampak disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Milani, 1975).

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian Nurhalimah dan Abdullah (2013) dan Emilia *et al.* (2013) yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut berarti semakin aktif keterlibatan para bawahan (tim pengembang sekolah) dalam penyusunan anggaran maka akuntabilitas kinerja semakin tinggi, namun temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Sumarno (2005) yang menemukan bukti empiris adanya hubungan negatif antara partisipasi dengan kinerja manajerial.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan memiliki nilai $t_{hitung} = 2,672 > t_{tabel} = 1,993$ dan tingkat signifikansi $_{hitung} = 0,009 < 5\%$. Hal ini berarti hipotesis 3 yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Koefisien korelasi parsial sebesar 0,715 menunjukkan setiap peningkatan sistem pelaporan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Semakin baik sistem pelaporan yang dibuat sekolah, semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang dimiliki sekolah. Sistem pelaporan anggaran sekolah yang

dilakukan oleh Sekolah Menengah saat ini berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara manual dan online. Fenomena yang terjadi pada sekolah menengah di Kabupaten Lombok Timur adalah sistem pelaporan penggunaan anggaran sekolah secara online baru-baru dilakukan sehingga banyak sekolah yang tidak bisa untuk melakukan pelaporan secara online. Disamping itu, sedikitnya waktu yang diberikan kepada sekolah untuk melakukan sistem pelaporan keuangan secara online juga mempengaruhi banyaknya sekolah menengah yang tidak melakukan sistem pelaporan tersebut, sehingga berdampak pada banyaknya Sekolah Menengah Negeri yang ditunda pencairan dana BOS tahap berikutnya. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori *signaling* yang menjelaskan bahwa sekolah sebagai pihak yang diberi amanat oleh pemerintah dan masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik.

Tujuannya adalah agar pemerintah dan masyarakat dapat terus mendukung kinerja sekolah saat ini, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. Sistem pelaporan keuangan yang baik, dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal yang baik kepada pemerintah dan masyarakat. Hasil temuan terkait dengan sistem pelaporan, di atas sejalan dengan penelitian Anjarwati (2012) yang menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Herawati (2011) yang menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi variabel pengendalian akuntansi sebesar 0,575. Nilai signifikansi variabel pengendalian akuntansi 0,001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 3,591 > t_{tabel} 1,993$. Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa untuk meminimalisir asimetri informasi di dalam internal pengelolaan keuangan sekolah maka diperlukan pengendalian akuntansi untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para kepala sekolah dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian terkait pengendalian akuntansi, peneliti menemukan sebagian besar Sekolah Menengah Negeri yang ada di Pulau Lombok melakukan pengendalian akuntansi. Hal tersebut terlihat pada terinventarisasinya barang/peralatan yang ada di sekolah. Terkait dengan fenomena tidak dilampirkannya daftar pembelian inventaris sekolah pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur karena dinas DIKPORA Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram tidak mensyaratkan sekolah untuk wajib melampirkan daftar pembelian inventaris sekolah pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Oleh karena itu, pengendalian akuntansi di Sekolah Menengah Negeri selalu dilakukan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang

tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusumaningrum (2010) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian Herawati (2011) yang mengatakan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Anjarwati (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan terakhir yang ingin dijawab adalah Apakah terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok?.

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak, baik kepala sekolah maupun bawahannya memainkan peranan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif, dimana anggaran senantiasa digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja. Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, ketika tujuan dirancang secara jelas dan melibatkan partisipasi bawahan dan stakeholders maka semuanya akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya karena ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Kassel, 2008).

Hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh nilai *sig.* 0,000 dan nilai F_{hitung} sebesar 17,654. Hasil tersebut mencerminkan

bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok. Hasil ini memberi makna bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang akan dihasilkan. Upaya sekolah dalam menciptakan akuntabilitas kinerja yang tinggi tentunya sekolah harus memiliki sasaran anggaran yang jelas. Untuk mencapai anggaran yang jelas tentunya instansi sekolah harus melibatkan bawahan dan *stakeholders* dalam RKAS dan RAPBS. Teori keagenan memberikan berbagai gambaran tentang bagaimana agen dengan *principal* menjalin hubungan yang harmonis, supaya anggaran yang disusun bersama menjadi lebih baik dan akurat tentunya harus didukung dengan pengendalian akuntansi yang bagus.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok. Secara teori, temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Negeri, yang mana akuntabilitas kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah selaku pemegang amanah (*agen*) kepada masyarakat dan pemerintah selaku pemberi amanah (*principal*) sehingga mendukung teori keagenan (*agency theory*) dan teori sinyal (*signaling theory*).

Secara praktis hasil temuan ini dapat digunakan oleh Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok sebagai bahan masukan dalam menyikapi fenomena yang ber-

kembang saat ini berkaitan dengan akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi. Demikian pula secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah-sekolah menengah (SMP, SMA, SMK) negeri untuk bahan evaluasi serta dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi para kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan anggaran sekolah yang akan dibuat, dengan memperhatikan kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah yang dikelola.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial dan simultan variabel-variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap variabel akuntabilitas kinerja pada Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok. Dari hasil pengolahan data, dihasilkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut: (a) Secara simultan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi, semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Kejelasan sasaran anggaran yang bagus didukung oleh partisipasi aktif para bawahan dan stakeholders, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi dalam menyusun program kerja dan kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah dalam menghasilkan anggaran yang berkualitas; (b) Secara parsial, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh dan signi-

fikan terhadap kinerja manajerial. Artinya, semakin jelas sasaran anggaran sekolah yang dibuat, maka akuntabilitas kinerja semakin tinggi. Kejelasan sasaran anggaran dapat memudahkan kepala sekolah dalam merealisasikan setiap kegiatan program yang telah di tetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS); (c) Secara parsial, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya, semakin aktif keterlibatan para bawahan dan *stakeholders* dalam penyusunan anggaran, maka akuntabilitas kinerja semakin tinggi. Partisipasi penyusunan anggaran mendorong kepala sekolah, para bawahan, *stakeholders* mengenal dan menerima tujuan, serta ber-sungguh-sungguh mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (d) Secara parsial, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem pelaporan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja akan meningkat dengan adanya peningkatan dalam hal sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang bagus dapat menambah keyakinan para *stakeholders* terhadap transparansi pengelolaan anggaran di sekolah serta dapat meningkatkan kredibilitas sekolah; (e) Secara parsial, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi memberikan dampak baik terhadap akuntabilitas kinerja sekolah. Semakin tinggi pengendalian akuntansi yang dilakukan sekolah terhadap pembelanjaan keuangan sekolah terutama terhadap inventarisasi barang/peralatan sekolah, maka pertanggungjawaban kinerja sekolah akan semakin tinggi.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang harus dicermati dan saran terhadap keterbatasan

yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian, antara lain: (1) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Sekolah Menengah Negeri se-Pulau Lombok yang dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi sekolah pada jenjang sekolah dasar negeri/swasta dan sekolah menengah swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekolah Menengah Negeri dan swasta yang ada di bawah naungan Kementrian Agama yang ada di Pulau Lombok. Oleh karena itu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian pada lokasi yang lebih luas; (2) Berdasarkan hasil perhitungan *Adjusted R Square* sebesar 0,484. Hal ini berarti 51,6% perubahan variabel dependent dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dan tidak diteliti dalam model penelitian ini. Hal ini menjadi petunjuk belum melibatkan variabel-variabel relevan lainnya yang berpengaruh misalnya profesionalisme dan budaya organisasi.

Saran

Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian pada lokasi penelitian yang berbeda, seperti sekolah pada jenjang Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau sekolah negeri dan swasta di bawah naungan Kementrian Agama yang ada di Pulau Lombok; (2) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian, tidak hanya pada variabel kejelasan sasaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi, tetapi juga kemungkinan untuk menguji variabel profesionalisme dan budaya organisasi. Sehingga penelitian mendatang diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada Sekolah Menengah Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. S., dan Suwondo. 2009. Pengembangan Sumberdaya Aparatur sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja (Studi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Wacana* 12(3): 417-441.
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal* 1(2): 1-7.
- Antipova, T. dan A. Antipov. 2014. Performance Measurement in Public Sector. *Global Conference on Business and Finance Proceedings* 9(1): 204-207.
- Aprila, N. dan S. Hidayani. 2012. The Effect Budgetary Participation, Asymmetry Information, Budget Emphasis and Commitment Organization to Budgetary Slack at SKPD Governmental of Bengkulu City. *Proceeding the 13th Malaysia Indonesia Conference on Economics, Management, and Accounting (MIICEMA) Palembang*: 617-628.
- Ghobadian, A. dan J. Ashworth. 1994. Performance Measurement in Local Government - Concept and Practice. *International Journal of Operations & Production Management* 14(5): 35-51.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Anggaran semester I tahun 2015*.
- Badruzman, J. dan I. Chairunnisa. 2012. Pengaruh Implementasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7(1).
- Busuic, A. dan R. R. Birau. 2011. The Role of Information Asymmetry in the Outburst and the Deepening of the Contemporary Economic Crisis. *Academy of Economic Studies Journal*: 891-902.
- Curristine, T. 2005. Government Performance: Lessons and Challenges. *OECD Journal on Budgeting* 5(1): 127-151.
- Darwanis dan S. Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 6(2): 150-174.
- Dhermawan, A. A. N. B., I. G. A. Sudibya, dan I. W. M. Utama. 2012. Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi, dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan* 6(2): 173-184.
- Emilia, R. N., A. Willy dan Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkulu). *Jurnal Fairness* 3(3): 42- 53.
- Fatah, N. 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. CV. Pustaka Bani Qurais. Bandung.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gori, E. dan S. Fissi. 2014. New Trends in Public Sector Performance Measurement and Evaluation: A Closer Look at the Italian Reform. *Organization Development Journal* 32(2): 101-122.
- Herawati, N. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 13 (2): 31-36.
- Jaros, S. 2007. Meyer dan Allen Model of Organizational Commitment: Measurement Issues. *The Icfai Journal of Organizational Behavior* 4(4): 7-25.
- Karmandita, I. G. N. dan M. Subudi. 2014. Pengaruh Kompetensi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan Si Doi Hotel dan Restaurant Legian. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 3(4): 1171-1181.
- Kassel, D. S. 2008. Performance, Accountability, and the Debate over Rules. *Public Administration Review* 68(2): 241-252.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. UPPStim YKPN. Yogyakarta.
- Kusumaningrum, I. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro*. Jawa Tengah.
- Lavarda, C. E. F. dan D. M. Almeida. 2013. Budget participation and informational asymmetry: A Study in a multinational company. *Brazilian Business Review* 10(2): 72-94.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Micheli, P. dan A. Neely. 2010. Performance Measurement in the Public Sector in England: Searching for the Golden Thread. *Public Administration Review* 70(4): 591-600.
- Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study. *The Accounting Review* 50(2): 274-284.
- Moxham, C. dan Boaden, R. 2007. The Impact of Performance Measurement in the Voluntary Sector. *International Journal of Operations and Production Management* 27(8): 826-845.
- Nuraini. dan D. Indudewi. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian, Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes. *Jurnal Solusi* 11(4): 63-77.
- Nurhalimah, D. dan S. Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2(1): 27-36.

- Safwan, Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2014. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Akuntansi Pasca-sarjana Universitas Syiah Kuala*. 3(1): 133-139.
- Sanjaya, I. K. E. dan A. D. Indrawati. 2014. Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pande Agung Segara Dewata. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 3(1): 205-224.
- Shields, M. D. dan S. M. Young. 1993. Antecedents and Consequences of Participative Budgeting: Evidence on the Effects of Asymmetrical Information. *Journal of Management Accounting Research* 5: 265.
- Su, C. C. dan F. Y. Ni. 2013. Budgetary Participation and Slack on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Organizational Innovation* 5(4): 91-99.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta. Bandung.
- Sulistyaningsih, A. 2009. Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Karakteristik Individu, Locus of Control, dan Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. *EXCELLENT* 1(1).
- Sumarno, J. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta). *Jurnal Bisnis Strategi* 14(2): 197-210.
- Trisnawati, M. D. dan K. Achmad. 2013. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 2(2).
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Wijaya, A. H. C. dan R. Akbar. 2013. The Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Journal of Indonesian Economy and Business* 28(1): 62 - 83.
- Winanti, M. B. 2011. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan (Survei Pada PT. Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah UNIKOM* 7(2): 249-267.
- Yilmaz, E. dan G. Ozer. 2011. The Effects of Environmental Uncertainty and Budgetary Control Effectiveness on Propensity to Create Budgetary Slack in Public Sector. *African Journal of Business Management* 5(22): 8902-8908.
- Yuen, P. P. dan A. W. Ng. 2012. Towards a Balanced Performance Measurement System in a Public Health Care Organization. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 25(5): 421-430.
- Zakaria, Z., M. A. Yaacob, Z. Yaacob, N. Noordin, M. Z. H. M. Sawal, dan Z. Zakaria. 2011. Key Performance Indicators (KPIs) in the Public Sector: A Study in Malaysia. *Asian Social Science* 7(7): 102-107.